



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 416 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-331/MK.02/2022 tanggal 15 April 2022;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16245/B-BP.02.01/SD/K/2021 tanggal 26 November 2021;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

4. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 432/S/X/9/2022 tanggal 5 September 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Badan Pemeriksa Keuangan sejumlah 107 (seratus tujuh) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- KELIMA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pemeriksa Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pemeriksa Keuangan;

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 6 September 2022

Plt. MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

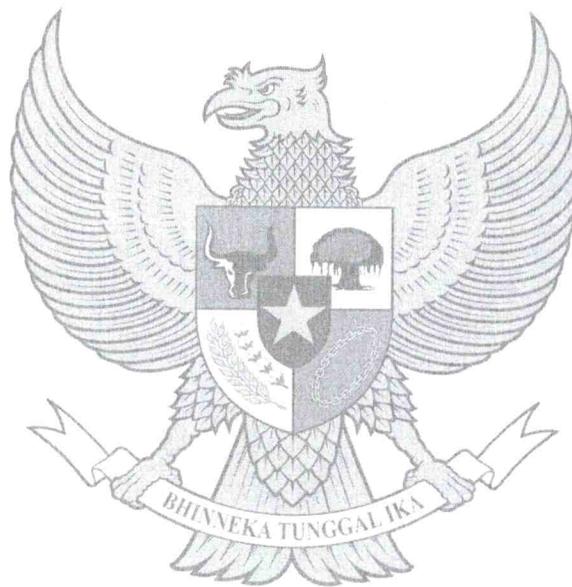


MOH MAHFUD MD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA  
 KEUANGAN TAHUN 2022

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1		KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SDM , KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN , KEPALA SUB BAGIAN KESEHATAN
2.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1		KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SDM , KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN , KEPALA SUB BAGIAN KESEHATAN
TOTAL			2		



**panrb**

KEMENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BANTEN , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN BANTEN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI BANTEN
2.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALTARA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KALTARA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KALTARA
3.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI NTB , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN NTB , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI NTB
4.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULBAR , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULBAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SULBAR
5.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULTRA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULTRA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SULTRA
6.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI MALUT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN MALUT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI MALUT
7.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KALSEL , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI
8.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI LAMPUNG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN LAMPUNG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI LAMPUNG
9.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KEPULAUAN RIAU , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KEPULAUAN RIAU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KEPRI
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA IV , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA IV , KEPALA SEKRETARIAT AKN IV , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN IV
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA I , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA I , KEPALA SEKRETARIAT AKN I , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN I
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA VII , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VII , KEPALA SEKRETARIAT AKN VII , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN VII
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI ACEH , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN ACEH , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI ACEH
14.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI RIAU , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN RIAU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI RIAU
15.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI PAPUA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN PAPUA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI PAPUA
16.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA II , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA II , KEPALA SEKRETARIAT AKN II , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN II
17.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA SEKRETARIAT AKN V , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN V
18.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA III , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III , KEPALA SEKRETARIAT AKN III , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN III

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
19.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA SEKRETARIAT AKN VI , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN VI
20.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	3	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA , KEPALA SEKRETARIAT BADAN DIKLAT PKN , KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TI
21.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	5	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO UMUM , KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DOKUMEN , KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN ARSIP
22.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KEP. BABEL , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KEP. BABEL
23.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BENGKULU , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN BENGKULU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI BENGKULU
24.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DI YOGYAKARTA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN DIY , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI DIY
25.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JATENG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JATENG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI JATENG
26.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALBAR , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KALBAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KALBAR
27.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALTENG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KALTENG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KALTENG
28.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI NTT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN NTT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI NTT
29.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI KALTIM , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN KALTIM , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI KALTIM
30.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BALI , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN BALI , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI BALI
31.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULSEL , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SULSEL
32.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULTENG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULTENG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SULTENG
33.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULUT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULUT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SULUT
34.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI GORONTALO , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN GORONTALO , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI GORONTALO
35.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI MALUKU , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN MALUKU , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI MALUKU



TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
36.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI PAPUA BARAT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN PAPUA BARAT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI PAPUA BARAT
37.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , AUDITOR UTAMA INVESTIGATIF , KEPALA SEKRETARIAT AUDITORAT UTAMA INVESTIGATIF , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AUDITORAT UTAMA INVESTIGATIF
38.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMUT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMUT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SUMUT
39.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMBAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SUMBAR
40.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JAMBI , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JAMBI , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI JAMBI
41.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DKI JAKARTA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN DKI , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI DKI
42.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JABAR , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JABAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI JABAR
43.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JATIM , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JATIM , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI JATIM
44.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 AKUTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV KEARSIPAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMSEL , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SUMSEL
45.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMSEL , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI SUMSEL
46.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI LAMPUNG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN LAMPUNG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI LAMPUNG
47.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JABAR , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JABAR , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI JABAR
48.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO UMUM , KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN LAYANAN PENGADAAN
49.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DKI JAKARTA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN DKI , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI DKI
50.	AHLI PERTAMA - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA , KEPALA PUSAT AKADEMIK DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DIKLAT PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA , KEPALA BIDANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
51.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SULSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SULSEL , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN HUMAS SULSEL
52.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA V

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
53.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JATENG , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JATENG , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS JATENG
54.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA
55.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA III
56.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA INTERNASIONAL , KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI , KEPALA SUB BAGIAN PUBLIKASI DAN MEDIA
57.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI JATIM , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN JATIM , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS JATIM
58.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA INTERNASIONAL , KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI , KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN INFORMASI
59.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA I
60.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA IV
61.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DI YOGYAKARTA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN DIY , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN DIY
62.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA VII
63.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BALI , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN BALI , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN HUMAS BALI
64.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI NTT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN NTT , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN HUMAS NTT
65.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMUT , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMUT , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN SUMUT
66.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMSEL , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN SUMSEL , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN SUMSEL
67.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SISTEM INFORMASI / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI DKI JAKARTA , KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN DKI , KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DKI
68.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA VI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
69.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INGGRIS	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN , KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT KETUA , KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT ANGGOTA II
70.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BPK , KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KELEMBAGAAN
71.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN DAN MANAJEMEN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA SUB BAGIAN MANAJEMEN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI
72.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA BAGIAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN
73.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO SDM , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN MUTASI , KEPALA SUB BAGIAN ANJAB DAN SISDM
74.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	5	2	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA BAGIAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI , KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN TIK
75.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA I , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA I , KEPALA SEKRETARIAT AKN I , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN I
76.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA V , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V , KEPALA SEKRETARIAT AKN V , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN V
77.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA III , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III , KEPALA SEKRETARIAT AKN III , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN III
78.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA , KEPALA SEKRETARIAT BADAN DIKLAT PKN , KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN TI
79.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VII , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VII , KEPALA SEKRETARIAT AKN VII , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN VII
80.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA IV , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA IV , KEPALA SEKRETARIAT AKN IV , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN IV
81.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA II , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA II , KEPALA SEKRETARIAT AKN II , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN II
82.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , SEKRETARIS JENDERAL , KEPALA BIRO UMUM , KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DOKUMEN , KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN ARSIP
83.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , ANGGOTA VI , AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI , KEPALA SEKRETARIAT AKN VI , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AKN VI
84.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN / D-III SEKRETARIS / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	KETUA BPK RI , WAKIL KETUA BPK RI , AUDITOR UTAMA INVESTIGATIF , KEPALA SEKRETARIAT AUDITORAT UTAMA INVESTIGATIF , KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN AUDITORAT UTAMA INVESTIGATIF
TOTAL				105	

